

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Akuntansi dikenal sebagai proses mengelola transaksi keuangan hingga menjadi informasi keuangan. Terdapat akuntansi komersial dan akuntansi sektor publik dalam bidang akuntansi. Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik, salah satunya adalah instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan publik oleh instansi pemerintah harus dilakukan dengan transparan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui prestasi yang telah dicapai aparatur negara. Transparansi dilakukan sebagai bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemerintah baik daerah maupun pusat memiliki berbagai kegiatan setiap tahunnya, tidak terkecuali Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Adanya berbagai kegiatan tersebut membuat instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil yang telah dicapai secara sistematis untuk kepentingan akuntabilitasnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 01 tahun 2019 tentang penyajian laporan keuangan, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi informasi yang menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan suatu instansi dengan anggarannya. Anggaran dinyatakan dalam ukuran finansial dan dibuat sebelum suatu kegiatan dilakukan sebagai perencanaan dan pengendalian untuk menghindari adanya kelebihan pengeluaran, kekurangan pengeluaran dan salah sasaran. Anggaran juga digunakan sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai.

Anggaran belanja yang telah disusun memerlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan anggarannya untuk memastikan kegiatan belanja tidak melebihi anggaran yang tersedia. Perbandingan ini juga digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mencapai target serta sebagai bahan evaluasi periode berikutnya. Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka penulis melakukan tinjauan atas proses perhitungan penyerapan anggaran, hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam laporan akhir ini dengan judul **“Analisis Penyerapan Anggaran Belanja tahun 2017-2019 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencatatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perbandingan jumlah anggaran belanja tahun 2017, 2018 dan 2019 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana perhitungan penyerapan anggaran belanja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
4. Bagaimana penyerapan anggaran belanja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Menguraikan pencatatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Menguraikan perbandingan jumlah anggaran belanja tahun 2017, 2018 dan 2019 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Menguraikan perhitungan persentase penyerapan anggaran belanja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Menguraikan penyerapan anggaran belanja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

## 1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan saran dalam mengevaluasi anggaran belanja baik dalam menyempurnakan, mempertahankan, atau mengembangkan.
2. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor  
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor terkait pembuatan karya ilmiah dalam bidang kajian yang sama.
3. Bagi Pembaca  
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai anggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.